

Menganalisa dinamika dan tantangan pancasila sebagai sikap anti korupsi

Ahmad Syihab Fanani

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: syihabfanani@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, anti-korupsi, keadilan sosial, dinamika sosial, tantangan korupsi

Keywords:

Pancasila, anti-corruption, social justice, social dynamics, challenges of corruption

ABSTRAK

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, telah lama menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang diharapkan menjadi acuan moral dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun sosial. Salah satu nilai yang paling relevan dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini adalah nilai keadilan sosial, yang seharusnya menjadi landasan dalam pemberantasan praktik korupsi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai fondasi moral dalam upaya memberantas korupsi, tantangan signifikan masih ada. Korupsi yang merajalela telah menggoyahkan kepercayaan masyarakat, berdampak pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dan mencari solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini, sehingga Pancasila dapat berfungsi secara optimal dalam menanggulangi praktik korupsi di Indonesia.

ABSTRACT

Pancasila is als basis van de Indonesische staat al lang een leidraad voor het nationale en staatsleven. Elk principe van Pancasila bevat nobele waarden waarvan verwacht wordt dat ze een moreel referentiepunt vormen in het dagelijks leven, zowel op individueel als op sociaal niveau. Een van de meest relevante waarden in de huidige sociaal-politieke context van Indonesië is de waarde van sociale rechtvaardigheid, die de basis zou moeten vormen voor het uitroeien van corrupte praktijken. Hoewel er verschillende pogingen zijn gedaan om de principes van Pancasila toe te passen als moreel fundament in de strijd tegen corruptie, blijven er aanzienlijke uitdagingen bestaan. De wijdverbreide corruptie heeft het publieke vertrouwen geschaad, wat gevolgen heeft voor de sociale, economische en politieke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om de dynamiek van de implementatie van Pancasila-waarden te begrijpen en effectieve oplossingen te vinden om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zodat Pancasila optimaal kan functioneren bij het bestrijden van corrupte praktijken in Indonesia.

Pendahuluan

Latar belakang

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, telah lama menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang diharapkan menjadi acuan moral dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun sosial. Salah satu nilai yang paling relevan dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini adalah nilai keadilan sosial, yang seharusnya menjadi landasan dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pemberantasan praktik korupsi. Namun, meskipun Indonesia telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan besar muncul dalam bentuk korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis negara, harus menjadi alat yang efektif untuk menghadapi masalah korupsi di Indonesia. Dalam konteks bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan penerapan Pancasila sebagai sikap anti-korupsi dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia. Makalah ini akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi korupsi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Tujuan

1. Memahami bagaimana dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi masalah korupsi di Indonesia.
2. Mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi dalam menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sikap anti korupsi dalam kehidupan sosial dan politik.
3. Mengerti apa peran lembaga negara dan masyarakat dalam memperkuat Pancasila sebagai landasan untuk menanggulangi korupsi.

Pembahasan

Bagaimana Dinamika Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Masalah Korupsi di Indonesia. Korupsi terus menjadi tantangan besar bagi Indonesia, apalagi pada tahun 2024 kali ini banyak kasus korupsi besar terungkap. Angka kasus korupsi seakan lomba saling salip menyalip disetiap tahunnya yang menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi bangsa, karena korupsi menyebabkan terhambatnya pembangunan dan masyarakat. Maraknya tindak pidana korupsi seperti diatur dalam UU No.20 tahun 2001 digolongkan sebagai delik khusus karena tidak hanya melanggar keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat umum. Pancasila merupakan Ideologi negara yang memiliki arti semua unsur kehidupan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila termasuk pendidikan yang bertujuan setiap warga Indonesia dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan berkepribadian Pancasila. Dimasa era globalisasi yang berkembang semakin cepat Pancasila menghadapi banyak dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa bagi warga Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar negara, mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.

1. Penanaman Nilai Pancasila Edukasi dan Kesadaran: Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, terutama yang berkaitan dengan keadilan, ketuhanan, dan persatuan. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan Pancasila dapat membantu membentuk moralitas individu.

2. Implementasi dalam KebijakanRegulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi menjadi wujud nyata dari sila keadilan sosial.
3. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan Publik: Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Partisipasi ini sejalan dengan nilai musyawarah yang terkandung dalam Pancasila.
4. Budaya Anti-KorupsiPenguatan Budaya: Membangun budaya anti-korupsi yang sejalan dengan nilai Pancasila, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab untuk menegakkan integritas dan kejujuran.
5. *Kolaborasi Antar Lembaga Sinergi antara Pemerintah dan Swasta*: Kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan sistem yang mendukung transparansi dan pencegahan korupsi.

Tantangan yang di hadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pancasila sebagai sikap anti korupsi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sikap anti-korupsi dalam kehidupan sosial dan politik menghadapi berbagai tantangan di antaranya:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Pancasila Banyak individu yang tidak memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila, sehingga sulit menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperparah oleh lemahnya pendidikan karakter di beberapa lembaga pendidikan.
2. Budaya Korupsi yang Sudah Mengakar Korupsi sering dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan “budaya”, terutama di lingkungan politik dan birokrasi. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kejujuran sulit diterapkan karena norma sosial yang permisif terhadap korupsi
3. Minimnya Keteladanan dari Pemimpin Pemimpin yang seharusnya menjadi contoh justru sering terlibat dalam praktik korupsi. Keteladanan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.
4. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas Hukum yang lemah dan tidak konsisten dalam menghukum pelaku korupsi menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan.
5. Tekanan Globalisasi Globalisasi yang membawa pengaruh budaya luar terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Budaya materialisme dan hedonisme, misalnya, dapat memicu perilaku korupsi. Dengan adanya tantangan-tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sikap anti korupsi dalam kehidupan sosial dan politik, dengan ini Solusi yang bisa kita berikan yakni dengan
6. Memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah dan masyarakat.
7. Meningkatkan keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat.
8. Memperkuat penegakan hukum yang tegas dan adil.

9. Membudayakan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga institusi pemerintahan.
10. Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan sosial dan politik. Mengintegrasikan nilai Pancasila sebagai sikap anti-korupsi memang membutuhkan upaya berkelanjutan, namun hal ini penting untuk mewujudkan kehidupan sosial dan politik yang lebih bersih dan adil.

Peran lembaga negara dan masyarakat dalam memperkuat pancasila sebagai landasan untuk menanggulangi korupsi pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika dalam upaya menanggulangi korupsi di Indonesia. Lembaga negara harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Masyarakat juga berperan aktif dengan meningkatkan kesadaran dan melaporkan tindakan korupsi. Setiap sila Pancasila, seperti kejujuran dan keadilan sosial, menekankan pentingnya integritas dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Kerjasama antara lembaga negara dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang efektif. Agar dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Maka pendidikan sangatlah penting.

Dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan nasional dapat mulai memuat nilai-nilai Pancasila. Melalui Pembinaan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila, mahasiswa dapat dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang kuat Terhadap anti-korupsi. Selain itu, sosialisasi Pancasila melalui berbagai media juga penting untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye publik yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan bahayanya korupsi mampu dijalankan dalam media komunikasi, Platform interaktif, dan acara kelompok. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemerintahan dan pemberantasan korupsi juga perlu ditingkatkan. Dengan cara ini, Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar dihayati dan Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran lembaga negara dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat Pancasila sebagai landasan untuk menanggulangi korupsi. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan oleh keduanya sebagai berikut:

Peran Lembaga Negara:

1. Penegakan Hukum: Lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus secara tegas menegakkan hukum terhadap pelanggaran korupsi. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi.
2. Pendidikan dan Sosialisasi: Lembaga pendidikan dan pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, generasi muda akan memahami pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga negara harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Penggunaan teknologi informasi untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4. PEMBERDAYAAN Komisi Anti-Korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga sejenis perlu didukung secara penuh untuk menjalankan tugas mereka. Mereka harus diberikan wewenang dan sumber daya yang cukup untuk melakukan investigasi dan pencegahan korupsi.
5. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu merumuskan dan memperkuat regulasi yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, termasuk aturan mengenai konflik kepentingan dan gratifikasi.

Peran Masyarakat:

1. Partisipasi Aktif: Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan kontrol terhadap tindakan pemerintah. Melalui forum-forum masyarakat, mereka bisa menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan yang berpotensi korup.
2. Pendidikan dan Kesadaran: Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Kesadaran ini dapat dibangun melalui kampanye, seminar, dan diskusi publik.
3. Penggunaan Media Sosial: Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan melakukan advokasi terhadap tindakan korupsi. Media sosial juga dapat menjadi alat untuk mengorganisir gerakan anti-korupsi.
4. Pelaporan dan Whistleblowing: Masyarakat harus didorong untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) juga perlu diperkuat agar masyarakat merasa aman untuk melaporkan.
5. Keterlibatan dalam Pemilihan Umum: Masyarakat harus aktif dalam proses pemilihan umum dengan memilih pemimpin yang berintegritas dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks menghadapi masalah korupsi yang merajalela, nilai keadilan sosial dalam Pancasila menjadi sangat relevan dan harus dijadikan landasan dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, tantangan besar tetap ada, terutama dalam bentuk praktik korupsi yang menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai sikap anti-korupsi dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial. Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan nilai-nilai tersebut perlu dianalisis untuk menemukan solusi yang efektif.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus terus dilakukan, dengan Pancasila sebagai alat moral dan filosofis yang kuat dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, kesadaran dan komitmen semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sangat diperlukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-

hari, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustinus Wisnu Dewantara. (2015). 626-1010-1-Sm. *Pancasilasebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia*, V(1), 1–14.
- Di, K., Iii, K., & Darunnajah, M. I. (2021). *Peran Pendidikan Kepramukaan Dalam Membangun*. 4(2), 282–288.
- Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyan, D. (2022). *Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 102–108. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948>
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <http://repository.uin-malang.ac.id/5730/>
- Rahayu, P. P., & Musthofa, M. W. (n.d.). *Mencari Alternatif Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan Model Matematika Abstrak*. 11(1), 140–154.
- Ramadhan, I., Mahastuti, C., & Eiranda, A. O. (2024). *Guru Pendidikan Pancasila Sebagai Perancang Pembelajaran Antikorupsi*. 7(2), 37–47.
- Rokhmah, S. N., Putri, J. T., & Utomo, A. P. (2018). Pengaruh Role Model dan Religiusitas Terhadap Perilaku Antikorupsi pada Mahasiswa Organisatoris di Jawa Timur. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 15(2), 26. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i2.6741>
- Silitonga, T. B. (2020). *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan aktualisasi nilai-nilai ideologi negara nilai-nilai ideologi negara*. 17(1), 15–28.
- Siswantara, Y., & Parahyangan, U. K. (2023). *Implementasi Pendidikan Berbasis Pancasila Untuk Kepemimpinan Anti-Korupsi : Studi Kualitatif Tentang Nilai Dan*. 1, 1–10.
- Syarifah, L. (2014). *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sdi Riyadlul Muhtadiin Kedok Turen Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7439/>